

Term of Reference			
Document Name	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node-B Telkomsel		
Modification		Creation	27 April 2023
Written by	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia	Pages	Page 34 of 37
Version	1		

5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Total jangka waktu pekerjaan adalah 180 hari kalender semenjak tanggal ditandatanganinya kontrak.

6. Matriks Tanggung Jawab

Matriks Tanggung Jawab yang menjadi acuan dalam Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node-B Telkomsel ini adalah sebagai berikut:

No	SoW (Scope of Work)	PT INTI	Rekanan/Mitra	Ket.
1	Pembuatan BOQ, Timeline	R	S	
2	Evaluasi Administrasi, Negosiasi, PO	R	S	
3	Survey dan Design	R	R	
4	DRM	R	S	
5	Kick off Meeting dan Design Approval	R	S	
6	Evaluasi Pengadaan Material	R	R	
7	Project Schedule	R	S	
8	Progress Monitoring	R	S	
9	Packaging dan Delivery Material	S	R	
10	Pemeriksaan dan Penerimaan Material	S	R	
11	Perizinan	S	R	
12	Instalasi Material	S	R	
13	ATP dan Dokumentasi	R	R	
14	Rekonsiliasi	R	R	
15	BAST	R	R	
16	As Buit Drawing	S	R	

R: Responsible; S: Support

Matriks Tanggung Jawab tersebut merupakan acuan minimal dalam *project* ini. Detail Matriks Tanggung Jawab final dibahas lebih detail di dalam *Kick off Meeting* (KoM) berdasarkan proposal Rekanan/Mitra yang disetujui PT INTI.

7. Vendor Qualification

Calon Rekanan/Mitra Pelaksana harus memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut :

- a. Calon Rekanan/Mitra yang dipilih untuk diundang adalah calon Rekanan/Mitra yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Tidak memiliki *conflict of interest* terhadap bisnis PT INTI
 - Menyampaikan/memberikan hasil yang obyektif
- b. Memiliki pengalaman untuk pekerjaan yang serupa.

@2023, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Due to intelligent proprietary right, no copying, reproduction or editing is allowed in part or all of this documents content by using any means of electronic or manual devices, such action may result in severe and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the Republic of Indonesia law

